

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2016-2018**

*THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME, GENERAL ALLOCATION FUNDS, AND SPECIFIC ALLOCATION FUNDS ON CAPITAL EXPENDITURE IN THE REGENCIES / CITIES IN CENTRAL JAVA FOR THE 2016-2018 PERIOD*

Oleh :

**Fitri Dwi Jayanti**  
**Universitas Ngudi Waluyo Ungaran**

Email:

[fitridj82@gmail.com](mailto:fitridj82@gmail.com)

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah periode 2016-2018. Sampel dalam penelitian ini yaitu 35 (tiga puluh lima) daerah yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dan 6 (enam) Kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga jumlah data yang diuji selama 3 (tiga) tahun sebanyak 105 data. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2) memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Alokasi Khusus (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Belanja Modal

**Abstract:** The purpose of this study is to examine and analyze the effect of regional original income, general allocation funds, and specific allocation funds on capital expenditure in the regencies / cities in Central Java for the 2016-2018 period. The sample in this study is 35 (thirty five) regions consisting of 29 (twenty nine) Regencies and 6 (six) Cities in Central Java Province, so that the total data tested for 3 (three) years is 105 data. The data analysis technique used is multiple linear regression with SPSS version 20. The results show that the Regional Original income Variable (X1) and General Allocation Fund (X2) have an effect on Capital Expenditures while the specific Allocation Fund (X3) do not effect on Capital Expenditures.

**Keywords :** Regional Original income, General Allocation Fund, specific Allocation Fund, Capital Expenditures.

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah diatur oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan mengenai Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur didalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Otonomi daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini menandakan bahwa era pembangunan dilaksanakan secara mandiri. Pembangunan secara mandiri akan memberikan keoptimalan daerah dalam membangun daerahnya sendiri sehingga pemerintah daerah tidak bergantung pada pemerintah pusat. Otonomi ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan masyarakat dapat berperan secara bersama-sama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama yang berorientasi untuk kepentingan daerah.

Wujud pelaksanaan dari otonomi daerah adalah daerah diberikan kewenangan dibidang penerimaan anggaran atau keuangan baik secara administrasi maupun pemanfaatannya, yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerahnya sendiri guna mensejahterakan masyarakat (Huda & Sumiati, 2019). Pelaksanaan pemerintah dalam mengalokasikan belanja modal secara efektif dan efisien menjadi "PR" dalam mengupayakan laju pembangunan didaerah. Keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja modal dengan penyerapan anggarannya. Terserapnya belanja modal secara optimal akan meningkatkan dan memperbaiki pengadaan aset tetap dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Berikut Perbandingan penyerapan anggaran dengan realisasi belanja modal pada provinsi jawa tengah periode 2016-2018:

**Tabel 1. Penyerapan Belanja Modal :**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
2016	Rp 3.147.522.814.000	Rp 2.815.678.180.450	89%
2017	Rp 1.850.318.118.000	Rp 1.454.598.084.464	79%
2018	Rp 1.863.194.541.000	Rp 1.681.752.306.368	90%

Sumber : Data Peneliti diolah, 2020

Data menunjukkan bahwa penyerapan belanja modal pada tahun 2016 penyerapan sebesar 89%, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 79% dan pada tahun 2018 sebesar 90%. Dilihat dari hasil presentase penyerapannya belum cukup stabil dari tahun 2016-2018, akan tetapi ditahun 2018 mengalami peningkatan namun belum sepenuhnya 100% sesuai dengan anggaran yang telah diajukan.

Dalam meningkatkan dan memperbaiki pembangunan daerah, target yang diberikan oleh pemerintah pusat mengenai rata-rata belanja modal pada pemerintah daerah berkisar antara 26-30% dari total belanja daerah, hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019. Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016, belanja operasional Provinsi Jawa Tengah mencapai 78,6%, dan belanja modal hanya sebesar 21% dari total belanja daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah masih berada dibawah target rata-rata nasional (Sukmaji & Rohman, 2019).

Meningkatkan anggaran belanja modal sangat perlu dilakukan agar daerah lebih mengembangkan potensinya, sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sumber dari pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus yang ditetapkan setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dana alokasi umum dialokasikan untuk kebutuhan dan pembangunan daerah sedangkan dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus sesuai dengan urusan daerah dengan prioritas nasional (UU Nomor 33 Tahun 2004) .

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Keagenan

Hubungan antara pihak prinsipal dengan pihak agen merupakan teori dasar dari teori keagenan, dimana pihak agen merupakan pihak yang didelegasikan dan diberi wewenang dalam pengambilan keputusan, sedangkan

pihak prinsipal adalah yang memberikan wewenang (Jensen dan Meckling, 1976). Prinsipal bertindak untuk mengawasi serta memberikan penilaian tugas yang dijalankan oleh pihak agen. Perbedaan kepentingan ini yang akan menimbulkan *conflict of interest*, pihak agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal dimana hal ini dapat menimbulkan perbuatan atau tindakan yang dapat menguntungkannya. Tindakan yang bisa dilakukan atas keinginan dan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan usaha dan kepentingannya. Prinsipal dalam hal ini akan kesulitan mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh pihak agen. Didalam sektor publik, hubungan keagenan dalam hal ini antara legislatif dan eksekutif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau legislatif bertindak sebagai pihak prinsipal, sedangkan eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah daerah atau bertindak sebagai pihak agen. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah disetujui dan disahkan serta sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan dijadikan kontrol oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau legislatif dalam mengawasi dan meninjau kinerja pemerintah daerah. Penyerahan sepenuhnya penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai dan mencukupi kebutuhan daerahnya (Indriyani, I., & Adi, 2018).

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel Penelitian

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, diantaranya terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dan 6 (enam) Kota dari tahun 2016-2018 merupakan populasi dari penelitian ini. Cara pengambilan sampel dengan menggunakan sampling jenuh, dimana keseluruhan populasi dijadikan sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini yaitu 35 (tiga puluh lima) daerah yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dan 6 (enam) Kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga jumlah data yang diuji selama 3 (tiga) tahun sebanyak 105 data.

### Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang peroleh melalui media perantara atau secara tidak langsung dengan metode dokumentasi atau dilakukan dengan studi pustaka berupa jurnal, buku, dan artikel, dan catatan untuk laporan historis yang diarsipkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan. Sumber data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018 yang berupa data realisasi Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh melalui Situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).

### Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel Penelitian

#### Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk pemerolehan aset tetap dan aset lainnya dimana aset tersebut memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun periode akuntansi. Indikator yang digunakan dalam mengukur belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 65 meliputi: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya.

#### Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) merupakan sumber pendapatan daerah dai hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah (UU No.32 Tahun 2004 Pasal 157), Dana Alokasi Umum (DAU) (X2) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah (PP No. 12 Tahun 2019). Dana Alokasi Umum (DAU) didapatkan dari penjumlahan celah fiskal dengan alokasi dasar, dimana celah fiskal didapat dari pengurangan antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal (Indriyani, I., & Adi, 2018), Dana Alokasi Khusus (DAK) (X3) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (PP No. 12 Tahun 2019).

## HASIL PENELITIAN

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data memakai One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-,0000493
	Std. Deviation	1.06347450E11
Most Extreme Differences	Absolute	,081
	Positive	,081
	Negative	-,036
Kolmogorov-Smirnov Z		,831
Asymp. Sig. (2-tailed)		,495
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber : Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 20

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel dua dengan menggunakan kolmogorov-smirnov tes didapat hasil signifikansi sebesar 0.495. hal tersebut menunjukkan bahwa signifikansi lebih besar dari nilai 0.05, yang artinya bahwa hasil berdistribusi normal.

**Tabel.3 Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PAD	,757	1,320
DAU	,358	2,793
DAK	,409	2,445

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 20

Hasil uji pada tabel 3 digunakan untuk mengetahui hubungan yang kuat antara variabel independennya, dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *tolerance* dari variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah 0.757, variabel Dana Alokasi Umum (X2) sebesar 0.358, dan variabel Dana Alokasi Khusus (X3) sebesar 0.409. nilai *tolerance* tersebut menghasilkan lebih besar dari 0.10. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah 1.320, variabel Dana Alokasi Umum (X2) sebesar 2.793, dan variabel Dana Alokasi Khusus (X3) sebesar 2.445. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tersebut kurang dari 10. hasil dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan bahwa data tersebut didalam model penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas.

**Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,824 <sup>a</sup>	,680	,670	1.07915E11	1,888

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

Sumber : Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 20

Hasil pada tabel 4 adalah hasil uji autokorelasi dimana uji ini untuk mendeteksi autokorelasi dengan tujuan untuk melihat hubungan yang terjadi antara residual antar pengamatan satu dengan yang lain. Model yang baik adalah model penelitian yang tidak terjadi autokorelasi. Uji ini dapat dilihat dengan menggunakan uji *Durbin Watson*. Nilai *Durbin Watson* dari tabel diatas adalah 1.888, nilai dl pada tabel dw adalah 1.6237 dan nilai du

pada tabel dw adalah 1.7411. nilai 4-du adalah 2.2589. Apabila nilai  $du < d < 4-du$  ( $1.7411 < 1.888 < 2.2589$ ) maka hal tersebut tidak terjadi autokorelasi.

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9.613E9	2.629E10		-.366	.715
	PAD	-.019	.029	-.068	-.641	.523
	DAU	.075	.044	.264	1.704	.091
	DAK	.089	.094	.136	.941	.349

a. Dependent Variable: Abs\_res

Sumber : Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 20

Hasil pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai dari signifikansi PAD(X1) sebesar 0.523, DAU(X2) sebesar 0.091 dan DAK (X3) SEBESAR 0.349. Hasil dari ketiga variabel independen menunjukkan tingkat koefisien signifikansi  $> 0.05$ , dimana tidak terdapat heterokedastisitas.

**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.824 <sup>a</sup>	.680	.670	1.07915E11

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Sumber : Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 20

Hasil pada tabel 6 menunjukkan prosentase besar kecilnya pengaruh dari variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3) terhadap Belanja Modal sebesar 67%, sedangkan nilai sisanya adalah 33% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

**Tabel 7. Hasil Uji Parsial t**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.751E9	4.308E10		.133	.894
	PAD	.510	.048	.689	10.638	.000
	DAU	.162	.072	.211	2.242	.027
	DAK	.220	.154	.126	1.426	.157

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Data diolah dengan menggunakan IBM SPSS 20

Hasil pada tabel 7 untuk menguji hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai  $sig\ t < \text{tingkat signifikansi } 0.05$ , maka hipotesis diterima. Apabila nilai  $sig\ t > \text{tingkat signifikansi } 0.05$ , maka hipotesis ditolak. Kesimpulan dari hasil uji tersebut adalah :

- Nilai signifikansi dari variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) menunjukkan bahwa nilai  $sig\ t\ 0.000 < 0.05$  yang artinya **hipotesis diterima**. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.
- Nilai signifikansi dari variabel Dana Alokasi Umum (X2) menunjukkan bahwa nilai  $sig\ t\ 0.027 < 0.05$  yang artinya **hipotesis diterima**. Variabel Dana Alokasi Umum (X2) memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

- c. Nilai signifikansi dari variabel Dana Alokasi Khusus (X3) menunjukkan bahwa nilai sig  $t$   $0.157 > 0.05$  yang artinya **hipotesis ditolak**. Variabel Dana Alokasi Khusus (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

Persamaan regresi berganda pada penelitian ini adalah  $\text{Belanja Modal} = 5.751E9 + 0.510X1 + 0.162X2 + 0.220X3 + e$ . Arti dari hasil persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

- Nilai konstanta adalah 5.751E9 dapat diartikan apabila PAD, DAU, DAK nilainya 0, maka belanja modal nilainya sebesar 5.751E9.
- Koefisien regresi variabel PAD adalah 0.510 dapat diartikan apabila variabel DAU, DAK nilainya tetap, dan PAD mengalami kenaikan 1%, maka nilai dari belanja modal mengalami kenaikan sebesar 5.751E9.
- Koefisien regresi variabel DAU adalah 0.162 dapat diartikan apabila variabel PAD, DAK nilainya tetap, dan DAU mengalami kenaikan 1%, maka nilai dari belanja modal mengalami kenaikan sebesar 0.162.
- Koefisien regresi variabel DAK adalah 0.220 dapat diartikan apabila variabel PAD, DAU nilainya tetap, dan DAK mengalami kenaikan 1%, maka nilai dari belanja modal mengalami kenaikan sebesar 0.220.

## PEMBAHASAN

### a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Modal

Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018, hal ini diketahui dari nilai signifikansi 0.000 yang lebih kecil daripada  $\alpha = 0.05$ . Besarnya pendapatan asli daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam menetapkan alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Tingginya peningkatan belanja modal disebabkan karena pendapatan asli daerah yang diperoleh juga tinggi. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal salah satunya adalah pendapatan asli daerah. Semakin tinggi nilai pendapatan asli daerah, semakin tinggi pula alokasi belanja modal. Sumber dari pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan pelayanan publik atau meningkatnya sarana dan prasarana publik akan memicu peningkatan pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Sukmaji dan Rohman (2019) dan Rachim et al., (2019)

### b. Pengaruh Dana Alokasi Umum (X2) terhadap Belanja Modal

Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018, hal ini diketahui dari nilai signifikansi 0.027 yang lebih kecil daripada  $\alpha = 0.05$ . Penggunaan dana alokasi umum dibutuhkan untuk pengalokasian belanja modal, tujuan dari dana alokasi umum juga untuk meningkatkan pelayanan publik guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dana alokasi umum dari pemerintah pusat telah dialokasikan secara tepat dan pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten/kota di provinsi jawa tengah mampu mengalokasikan pendapatannya tersebut untuk membiayai belanja modal. Pemerintah daerah pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah menggunakan dana alokasi umum untuk memaksimalkan pelayanan publik sehingga daerah-daerah yang kekurangan modal akan bisa terbantu, semakin banyak dana alokasi umum yang diterima akan semakin tinggi pula belanja modal yang akan diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Huda & Sumiati (2019) dan Novitasari et al., (2019)

### c. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (X3) terhadap Belanja Modal

Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Khusus (X3) tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018, hal ini diketahui dari nilai signifikansi 0.157 yang lebih besar daripada  $\alpha = 0.05$ . Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Huda & Sumiati (2019) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus juga bersumber pada pemerintah pusat yang tujuannya untuk membantu dalam hal mendanai kegiatan khusus yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan menjadi kewenangan daerah, namun dalam hal ini dana alokasi khusus yang diterima tidak seimbang dengan keefektifan tata kelola implementasi dana alokasi khusus bagi pembangunan daerah dan alokasinya tidak terserap pada belanja modal namun masih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai.

**KESIMPULAN**

- a. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.
- b. Variabel Dana Alokasi Umum (X2) memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.
- c. Variabel Dana Alokasi Khusus (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Huda, S., & Sumiati, A. (2019). PENGARUH PAD, DAU, DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*.
- Indriyani, I., & Adi, S. W. (2018). *Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4 . Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4*. 261–270.
- Jensen & Meckling, 1976, *The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*, *Journal of Financial and Economics*, 3:305-360
- Novitasari, desy, A. eddy sarwono dan S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(28), 502–508.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rachim, I. S. A., D.P, R. W., & Rizal, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun Periode 2015-2017. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(July 2019), 177–182.
- Sukmaji, D. D., & Rohman, A. (2019). DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN / KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8, 1–9.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) .